**PERCEPTION OF STUDENTS OF RIAU UNIVERSITY ON LAW NO.
20 OF 2001 CONCERNING THE ERADICATION OF CRIMINAL
ACTIONS CONDUCTED BY STATE PERSONNEL / STATE
ADMINISTRATOR**

Lian Winalda¹, Sri Erlinda², Jumili Arianto³

*E-mail : Lianwinalda41@gmail.com¹, linda_sri70@yahoo.com², jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³
No. Hp: 082385008684*

*Civic Education Departemen
Faculty of Teacher Training and Education
University of Riau*

Abstract : *This research is motivated by many corruption cases that occur in Indonesia, one of which is Edhy Prabowo and the increasing cases of alleged bribery related to the export permit of lobster seeds to the investigation stage. The formulation of the problem in this study is how Riau University Students' Perceptions of Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Committed by Civil Servants / State Administrators. The research objective was to determine the Riau University Student Perceptions of the Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Committed by Civil Servants / State Administrators. The benefits of research results for students are to provide an overview of Riau University Student Perceptions of the Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Committed by Civil Servants / State Administrators. This research method is descriptive quantitative, data collection instruments are questionnaires, interviews, and documentation consisting of 8 indicator with 45 statements. The population in this study were students of the University of Riau as many 32.436 people. The sample in this study was taken using the Qouta Sampling technique, and sampling using the Icedental Sampling as many 200 people. Based on the results of the study, it was found that the results of the average percentage value of the alternative answers to the dominant respondents were 76,39% where this range was in the Very Good category with the existence in the range 75,01% - 100%. Thus it can be concluded that the Perception of Riau University Student Against Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Committed by Civil Servants / State Administrators is Very Good.*

Key Words: *A Criminal act of Corruption*

**PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU TERHADAP
UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI/PENYELENGGARA
NEGARA**

Lian Winalda¹, Sri Erlinda², Jumili Arianto³

E-mail : Lianwinalda41@gmail.com¹, linda_sri70@yahoo.com², jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³
No. Hp: 082385008684

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia salah satunya Edhy Prabowo dan meningkatkan kasus dugaan suap terkait izin ekspor bibit lobster ke tahap penyidikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Manfaat hasil penelitian bagi para mahasiswa agar memberikan gambaran tentang Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Metode penelitian ini adalah *deskriptif kuantitatif*, instrumen pengumpulan data yaitu angket, wawancara, dan dokumentasi yang terdiri dari 8 indikator dengan 45 pernyataan. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Riau sebanyak 32.436 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *Qouta Sampling*, dan penarikan sampel dengan teknik *Incedental Sampling* sebanyak 200 orang. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa hasil dari rata-rata nilai presentase alternatif jawaban responden dominan yaitu sebesar 76,39% dimana rentang ini berada pada kategori “Sangat Baik” dengan keberadaan pada rentang 75.01% - 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara adalah Sangat Baik.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Sejak bergulirnya reformasi, isu pemberantasan korupsi selalu menjadi tema sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. Fenomena ini bisa dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang lain. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah yang serius, yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini akan menjadi budaya. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (UU No. 30 Tahun 2002).

Salah satu kasus korupsi di Indonesia adalah pada tanggal 25 November 2020, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Edhy Prabowo dan meningkatkan kasus dugaan suap terkait izin ekspor bibit lobster ke tahap penyidikan. (kompas.com). Tanggal 4 Desember 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan HDS (Direktur Teknik PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2007-2012) dalam perkara Dugaan Suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada saat tanggal 5 Desember 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan enam orang di beberapa tempat di Bandung dan Jakarta dalam kegiatan tangkap tangan terkait dengan Perkara Dugaan Suap dalam pengadaan Bantuan Sosial untuk Wilayah Jabodetabek Tahun 2020 (www.kpk.go.id).

Korupsi merugikan banyak pihak dan aspek, diantaranya ialah kerugian keuangan, nilai moral semakin menurun, mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan serta menghambat pelaksanaan pembangunan yang berakibat semakin meningkatnya kemiskinan yang secara otomatis mempengaruhi kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat. (Sari Rusmita, 2015).

Universitas Riau merupakan salah satu pilihan Universitas terbaik yang ada di Provinsi Riau. Dengan begitu besarnya minat dari putra dan putri terbaik yang melanjutkan ke Universitas ini mampu menampung sekitar 32.436 mahasiswa. Serta, mahasiswa Universitas Riau juga sering melakukan aksi serta menyuarakan untuk menolak Tindak Pidana Korupsi, sehingga terwakilkan untuk melakukan penelitian analisis terkait Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dari sudut pandang mahasiswa. Demikian penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Riau terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara?. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa Universitas Riau terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Riau yang berjumlah 32.436 Orang (UPT TIK per-17 September 2020). Berdasarkan penarikan sampel dengan menggunakan teknik *Incedental Sampling*, sampel dalam penelitian ini berjumlah 200 orang (20 orang per fakultas) dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *teknik quota sampling*.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan memberikan pernyataan kepada responden sesuai dengan variabel yang ada di dalam penelitian.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya diedit dengan memeriksa daftar pernyataan yang telah diserahkan kembali kepada peneliti, kemudian data-data dikoding dan ditabulasikan serta dimasukkan ke dalam tabel-tabel presentasi (distribusi frekuensi sederhana) sesuai dengan jumlah pernyataan yang diajukan. Langkah terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil olahan data berdasarkan data hasil kuesioner yang diisi oleh 200 responden dengan empat puluh lima (45) pernyataan pada 8 indikator sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pasal 2 : Dipidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Penjara Paling Singkat 4 Tahun Dan Paling Lama 20 Tahun Dan Denda Paling Sediikt Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)

Pernyataan	Alternatif Jawaban			
	SS	S	CS	KS
	%	%	%	%
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara	34,5	48	8,5	9
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.	34,5	44,5	11,5	9,5
Jumlah	69	92,5	20	18,5
Rata-Rata	34,5	46	10	9

Sumber: Data Olahan Tahun 2021

Maka hasil yang didapat dalam rekapitulasi diatas yaitu jawaban sangat setuju + setuju (34,5% + 46% = 80,5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 : Dipidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Penjara Paling Singkat 4 Tahun Dan Paling Lama 20 Tahun Dan Denda Paling Sediikt Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) termasuk pada kategori **sangat baik**.

Tabel 2. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pasal 3 : dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pernyataan	Alternatif Jawaban			
	SS	S	CS	KS
	%	%	%	%
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	30,5	42,5	13,5	13,5
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara	25,5	47,5	15	12
Jumlah	56	90	28,5	25,5
Rata-Rata	28	45	14	13

Sumber: Data Olahan 2021

Maka hasil yang didapat dalam rekapitulasi diatas yaitu jawaban sangat setuju + setuju (28% + 45% = 73%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 3 : dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) termasuk pada kategori **baik**.

Tabel 3. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pasal 5 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Pernyataan	Alternatif Jawaban			
	SS	S	CS	KS
	%	%	%	%
Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai	25,5	45,5	16,5	12,5

negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya				
Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya	24,5	47	15	13,5
Menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya	25	47,5	17,5	10
Menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya	22	47	21,5	9,5
Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya	22	53	13	12
Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya	18,5	55	16,5	10
Jumlah	137,5	295	100	67,5
Rata-Rata	22,9	49,2	16,6	11,3

Sumber: Data Olahan 2021

Maka hasil yang didapat dalam rekapitulasi diatas yaitu jawaban sangat setuju + setuju (22,9% + 49,2% = 72,1%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 5 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk pada kategori **baik**.

Tabel 4. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pasal 8 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Pernyataan	Alternatif Jawaban			
	SS	S	CS	KS
	%	%	%	%
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang karena jabatannya	27	51,5	10,5	11

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan surat berharga yang disimpan karena jabatannya	28	47	15	10
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut	24,5	51,5	16,5	7,5
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja membiarkan surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut	24	48,5	19,5	8
Jumlah	103,5	198,5	61,5	36,5
Rata-Rata	25,87	49,62	15,3	9,1

Sumber: Data Olahan 2021

Maka hasil yang didapat dalam rekapitulasi diatas yaitu jawaban sangat setuju + setuju (25,87% + 49,62% = 75,49%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 8 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) termasuk pada kategori **sangat baik**.

Tabel 5. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pasal 9 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Pernyataan	Alternatif Jawaban			
	SS	S	CS	KS
	%	%	%	%
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku yang khusus untuk pemeriksaan administrasi	24	52	13,5	10,5
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi	23	52	14	11
Jumlah	47	104	27,5	21,5
Rata-Rata	23,5	52	13,7	10,7

Sumber: Data Olahan 2021

Maka hasil yang didapat dalam rekapitulasi diatas yaitu jawaban sangat setuju + setuju (23,5% + 52% = 75,5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 9 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk pada kategori **sangat baik**.

Tabel 6. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pasal 10 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja

Pernyataan	Alternatif Jawaban			
	SS	S	CS	KS
	%	%	%	%
Menggelapkan barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya	29	50	12,5	8,5
Menghancurkan barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya	22	53	13,5	10,5
Merusakkan barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya	26	51,5	13,5	9
Membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya	26	51	15,5	7,5
Membiarkan orang lain menghilangkan barang, akta, surat, atau daftar tersebut	25	47	18,5	9,5
Membiarkan orang lain menghancurkan barang, akta, surat, atau daftar tersebut	24	54	14	8
Membiarkan orang lain merusakkan barang, akta, surat, atau daftar tersebut	24	51,5	16,5	8
Membiarkan orang lain membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut	26	47,5	18,5	8
Membantu orang lain menghilangkan barang, akta, surat, atau daftar tersebut	25	48,5	20	6,5
Membantu orang lain menghancurkan barang, akta, surat, atau daftar tersebut	23	49,5	19	8,5
Membantu orang lain merusakkan barang, akta, surat, atau daftar tersebut	23,5	50	19	7,5

Membantu orang lain membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut	21	54	17	8
Jumlah	271,5	607,5	179,5	99,5
Rata-Rata	22,6	50,6	14,9	8,2

Sumber: Data Olahan 2021

Maka hasil yang didapat dalam rekapitulasi diatas yaitu jawaban sangat setuju + setuju (22,6% + 50,6% = 73,2%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 10 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja termasuk pada kategori **baik**.

Tabel 7. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pasal 11 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Pernyataan	Alternatif Jawaban			
	SS	S	CS	KS
	%	%	%	%
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya	22	49,5	18	10,5
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya	22	55	14,5	8,5
Jumlah	44	104,5	32,5	19
Rata-Rata	22	52,25	16,25	9,5

Sumber: Data Olahan 2021

Maka hasil yang didapat dalam rekapitulasi diatas yaitu jawaban sangat setuju + setuju (22% + 52,25% = 74,25%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 11 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk pada kategori **baik**.

Tabel 8. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pasal 12 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap orang yang

Pernyataan	Alternatif Jawaban			
	SS	S	CS	KS
	%	%	%	%
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya	22,5	55,5	17,5	4,5
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya	26,5	53	15,5	5
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya	26	54,5	12,5	7
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat karena tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya	23	53,5	16	7,5
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya	29	49,5	14,5	7
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan disebabkan karena tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya	26	54	11,5	8,5
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri	29	50,5	13	7,5
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau	23,5	58	11,5	7

menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri				
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang	25,5	55,5	13,5	5,5
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, menerima pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang	27,5	53,5	13,5	5,5
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, menerima pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang	28	55	11,5	5,5
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang	19,5	58,5	14,5	7,5
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang	20,5	57,5	14,5	7,5
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	26,5	52	15	6,5
pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya	22,5	58,5	14	5
Jumlah	375,5	819	208,5	97
Rata-Rata	25,03	54,6	13,9	6,3

Sumber: Data Olahan 2021

Maka hasil yang didapat dalam rekapitulasi diatas yaitu jawaban sangat setuju + setuju (25,03% + 54,6% = 79,63%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 12 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap orang yang termasuk pada kategori **sangat baik**.

Berdasarkan tolak ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu apabila:

a.	Apabila rata-rata alternatif jawaban bersifat dominan yang responden terdapat pada rentang 75.01%-100% = Sangat Baik	Dijawab oleh
b.	Apabila rata-rata alternatif jawaban bersifat dominan yang responden terdapat pada rentang 50.01%-75% = Baik	Dijawab oleh
c.	Apabila rata-rata alternatif jawaban bersifat dominan yang responden terdapat pada rentang 25.01%-50% = Kurang Baik	Dijawab oleh
d.	Apabila rata-rata alternatif jawaban bersifat dominan yang responden terdapat pada rentang 0%-25% = Tidak Baik
(diolah dari Suharsimi Arikunto, 2010)	Dijawab oleh

Berdasarkan rekapitulasi umum, didapatkan bahwa Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara berada pada kategori “Sangat Baik”. Hal ini ditunjukkan dari hasil rata-rata nilai persentase alternatif jawaban responden dominan yaitu sebesar 76,39% dimana rentang ini berada pada kategori “Sangat Baik” dengan keberadaan pada rentang 75,01%100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara berada pada tingkat **Sangat Baik**.

Kemudian untuk hasil yang tertinggi yang diperoleh dari hasil penelitian diatas adalah terletak pada indikator pertama yaitu Pasal 2 : Dipidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Penjara Paling Singkat 4 Tahun Dan Paling Lama 20 Tahun Dan Denda Paling Sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) berjumlah sebesar (80,5%) yang terletak pada rentang 75,01%-100% yang berarti berada pada tingkat Sangat Baik, karena menurut Persepsi Mahasiswa Universitas Riau tentang Pasal ini sudah cukup untuk memberikan efek jera bagi koruptor, dan dilihat dari hukuman atau pidana penjara maupun denda yang berikan sudah cukup untuk para pegawai negeri/penyelenggara negara yang melakukan korupsi. Sedangkan untuk hasil terendah yang diperoleh dari hasil penelitian diatas adalah terletak pada indikator ketiga yaitu Pasal 5 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berjumlah sebesar (72,1) yang terletak pada rentang 50,01%-75% yang berarti berada pada tingkat Baik, karena Persepsi Mahasiswa Universitas Riau masih ada yang berpendapat bahwa pidana penjara paling singkat untuk koruptor pada pasal ini masih kurang memberikan efek jera bagi mereka, apalagi kasus yang terjadi adalah korupsi yang bukan hanya

merugikan negara, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini pada pasal 5 masih tergolong kedalam kategori Baik, tetapi masih ada yang kurang setuju.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara berada pada kategori “Sangat Baik” Hal ini ditunjukkan hasil perhitungan responden yang menjawab sangat setuju ditambah dengan hasil perhitungan responden yang menjawab setuju berjumlah $25,04\% + 51,35\% = 76,39\%$, dimana rentang ini berada pada kategori “Sangat Baik” dengan keberadaan pada rentang 75.01% - 100%.

Dengan demikian Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara adalah **Sangat Baik**.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada mahasiswa, kampus dan peneliti untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kepada mahasiswa sebagai kaum intelektual yang akan menjadi penerus generasi bangsa, agar selalu mendukung dan mengawasi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih baik lagi di Indonesia.
2. Kepada mahasiswa yang belum mengetahui tentang undang-undang No. 20 Tahun 2001, sebaiknya mempelajari atau mencari tahu apa saja isi tentang undang-undang tersebut.
3. Kepada kampus, sebaiknya melakukan seminar atau *workshop* mengenai undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, agar mahasiswa mengetahui pidana atau denda apa saja yang didapat ketika melakukan korupsi.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk penelitian berikutnya, agar penelitian ini dapat menjadi gambaran dan pembandingan untuk penelitian selanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, Penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Aras Mulyadi, DEA selaku Rektor Universitas Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Mahdum, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Dr. Gimin, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
5. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
6. Ibu Sri Erlinda, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Jumili Arianto, S.Pd., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang bersedia memberikan motivasi, bimbingan, arahan, kritik serta saran hingga penyelesaian Skripsi ini.
7. Bapak Dr. Gimin, M.Pd, Bapak Supentri, S.Pd, M.Pd dan Bapak Haryono, M.Pd selaku dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan dan masukan yang berguna bagi penulis.
8. Bapak Dr. Hambali, M.Si, Bapak Drs. H. Zahirman, M.H, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, Bapak Jumili Arianto, S.Pd, M.H, Bapak Supentri, S.Pd., M.Pd, Bapak Haryono, M.Pd, Bapak Separen, S.Pd, M.H, Bapak Indra Primahardani, M.H, Bapak Mirza Hardian, M.Pd dan Ibu Hariyanti, M.Pd selaku dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
9. Kepada kedua Orang tua saya tercinta, Ayahanda Abu Nawar dan Ibunda Ernawati, Kakak saya Wira Sutisna, Abang saya Barnes A.R dan Amstrong, Keluarga besar yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang, semangat dan selalu mendoakan penulis. Pengorbanan mereka begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rusmita, Sari. 2015. PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KORUPSI. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisni Universitas Tanjungpura*. Vol 4, No 2: 1-22.

www.kpk.go.igd diakses terakhir pada tanggal 08 Desember 2020 pukul 20.00 WIB.